

# **PRILAKU POLITIK PADA DEMOKRASI TRANSISI: Studi kasus di Provinsi Aceh pada Pemilu 2014**

**Chairul Fahmi**

*Aceh Institute Banda Aceh, Indonesia*

*chairulfahmi@acehinstitute.org*

## **ABSTRACT**

Studi ini bertujuan untuk melihat dinamika pemilu legislatif tahun 2014 di Indonesia, khususnya di Aceh. Selain itu untuk mengetahui bagaimana pola-pola kemenangan yang dilakukan oleh partai politik dan calon legislatif pada pemilu legislatif 9 April 2014 lalu, dimana kekerasan menjadi salah satu instrument untuk “menekan” pemilih agar memilih kandidat yang didukungnya. Penelitian ini menggunakan data hasil observasi media, dan laporan-laporan pemantau pemilu serta hasil wawancara (indept-interview) dengan pemangku kepentingan (penyelenggara dan peserta pemilu). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai dinamika berkembang dalam pelaksanaan di setiap tahapan pelaksanaan pemilu di Aceh. Pada masa kampanye praktik kekerasan terhadap lawan politik serta politik uang kepada konstituen menjadi fenomena yang masif terjadi dan terstruktur.

## **KEYWORDS**

Aceh; pemilu; kekerasan

## **PENDAHULUAN**

Pemilu merupakan instrumen politik yang paling esensi dalam sebuah negara demokrasi. Sebagai suatu sistem dalam pemilihan kepemimpinan suatu bangsa, pemilu seringkali menyajikan konstestasi diantara para politisi dan para pendukung pengusung, yang tidak jarang pertarungan di

Sebagai propinsi yang mempunyai kewenangan khusus melalui UU No. 11 Tahun 2006, Aceh telah melakukan transformasi politik secara fenomenal, salah satunya memperkenalkan instrumen politik baru di Indonesia, yaitu memberikan kesempatan bagi calon perseorangan untuk mencalonkan dirinya sebagai

gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2006. Selain itu, Aceh juga mempunyai kewenangan mendirikan partai lokal (parlok) yang tidak dimiliki oleh propinsi lain di Indonesia.

Kedua hak istimewa ini, seperti tercantum pada pasal 67 ayat (1) huruf (d) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UU khusus ini merupakan produk undang-undang hasil kesepakatan damai (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Indonesia dengan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Sedangkan ketentuan tentang kewenangan pendirian parlok di Aceh ditetapkan pada bab XI dimana kewenangan mendirikan partai lokal diberikan kepada setiap warga Aceh sekurang-kurangnya terdiri dari 50 orang (Pasal 75). Parlok hanya mempunyai hak untuk ikut dalam pemilu legislatif untuk tingkat propinsi (DPRA/Dewan Perwakilan Rakyat Aceh), dan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota), namun tidak untuk legislatif DPR-RI.

Pemilihan umum (Pemilu) pada 9 April 2014 yang memilih DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) baik untuk pusat, propinsi dan kabupaten/kota, serta DPD, merupakan pemilu kedua setelah perdamaian di Aceh pada 15 Agustus 2005, dimana pemilu pertama dilakukan pada tahun 2009. yang dimenangkan oleh Partai Aceh untuk tingkat provinsi yaitu mencapai 33 kursi dari total 69 kursi atau 48% (dpra. acehprov. go. id). Sementara untuk DPR Partai Demokrat memperoleh suara mayoritas, yaitu 7 wakil dari total 13 untuk kursi di Senayan.

Sementara pemilu 2014, Partai Aceh sebagai partai yang didirikan oleh mantan kombatan GAM tidak lagi berkoalisi dengan Partai Demokrat, setelah pemilukada 2012 Partai Demokrat mendukung pasangan Muhammad Nazar dan Nova Iriansyah. PA menetapkan partai Gerindra sebagai koalisi baru untuk pemilihan calon legislatif pusat (DPR) untuk pemilu 2014. Sebagai bentuk koalisi PA-Gerindra, Muzakir Manaf yang juga sebagai Ketua Umum PA ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasehat DPW Partai Gerindra Aceh berdasarkan SK nomor 03-0052/kpts/DPP-Gerindra/2013 (infoaceh.com). Sayangnya, hasil pemilu 2014 menyebabkan suara PA turun menjadi 35% atau memperoleh 29 kursi dari total 81 kursi untuk DPRA. Sedangkan partai Gerindra memperoleh 2 kursi untuk DPR masing-masing dari dapil Aceh-I dan dan Aceh-II

Secara umum ada dua tahapan yang sangat krusial dalam pemilu 2014; pertama tahapan kampanye, dan kedua tahapan menjelang pemugutan, dan perhitungan suara. Dari dua tahapan tersebut, masing-masing memiliki dinamika yang berbeda satu sama lain. Pada masa kampanye, fenomena yang paling menonjol adalah tindak kekerasan terhadap caleg dan atau partai politik tertentu serta black campaign (kampanye hitam). Data LBH Banda Aceh (2014) mencatat 69 kekerasan terjadi selama masa kampanye pemilu.

Menurut Asqalani, Ketua Bawaslu Aceh (Mei, 2014), kekerasan yang terjadi padaproses demokrasi di Aceh secara terstruktur dan sistematis. Adapun tujuan kekerasan ini untuk menekan kandidat lain, khususnya yang menjadi rival partai penguasa, yaitu Partai Aceh. Sehingga korban kekerasan paling banyak terjadi pada kader dan pendukung Partai Nasional Aceh (PNA) dan beberapa dari kader dan pendukung Partai Aceh (PA) juga menjadi korban.

Lebih jauh Asqalani mengatakan kekerasan berupa intimidasi juga terjadi terhadap penyelenggara pemilu yang dianggap tidak berpihak kepada kandidat atau partai politik tertentu. Beberapa panita penyelenggara dan pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan lapangan mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Sementara pada tahapan menjelang pemungutan, praktek transaksi uang cenderung meningkat, baik dengan pemilih maupun sebagian penyelenggara di level desa dan kecamatan. Sri Wahyuni (2014) mengatakan, transaksi uang terjadi secara masif, dan kompetitif. Pemilih cenderung bertanya langsung, berapa mau dibayar? Jika ada yang lebih tinggi tawarannya, maka ia akan mengambil yang lebih tinggi.

Praktek politik uang sudah menjadi trend yang terjadi secara masif di berbagai wilayah pemilihan. Namun menjadi hal baru di wilayah post-conflict, di samping kekerasan politik uang juga menjadi tuntutan untuk kemenangan. Di samping pemberian uang cash dan barang, pola pemberian dana aspirasi oleh incumbent, alokasi program pembangunan lewat fungsi budgeting, juga modus bantuan sosial menjadi trend di wilayah bekas konflik, seperti Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bener Meriah dan Aceh Timur.

Sulitnya mendapatkan saksi pelapor serta bukti oleh pengawas pemilu, menyebabkan praktek ini sulit diproses secara hukum (el-Hamda, 2014). Data Bawaslu Aceh (2014) menunjukkan dari 220 kasus pidana, tidak satupun kasus politik uang yang diproses oleh hukum. Penyelenggara pemilu di level bawah, seperti KPPS, PPS dan PPK tidak jarang bermain untuk kemenangan calon tertentu. Pemalsuan dan manipulasi penjumlahan suara dengan melakukan pengelambungan (mark-up) suara terhadap calon tertentu, dan menghilangkan suara kepada calon lain.

Febrice Lehoach (2002) menggambarkan praktek ini sebagai “electoral fraud”, di mana penyelenggara melakukan berbagai praktek kecurangan untuk kemenangan calon tertentu, baik di TPS (polling center), maupun dalam proses rekapitulasi. Lebih jauh Lehoach menyatakan, penyelenggara yang partisan juga menjadi bagian dari tindakan electoral fraud. Sementara Daniel Ziblatt (2009) menyatakan bahwa “electoral fraud” atau kecurangan pemilu terjadi tidak secara spontan, melainkan terencana dan terstruktur, bahkan dapat terbentuk dari sistem yang dibentuk untuk melahirkan potensi kecurangan dalam proses pemilu.

#### KEKERASAN DALAM PEMILU DI ACEH, EPISODE TANPA TITIK

Pola kekerasan dalam kemenangan pemilu, merupakan bentuk kegagalan transformasi perilaku dari situasi peperangan ke perdamaian. Pemilu masih

dipersepsikan sebagai arena perang, yaitu perang politik. Perang untuk merebut kekuasaan dan melestarikan kepentingan.

Sebagai mantan pelaku perang, melakukan kekerasan jika diperlukan menjadi hal lumrah terjadi di Aceh. Sejak konflik berakhir pada 15 Agustus 2005, berbagai kekerasan masih kerap terjadi. Episode pertama terjadi saat pemilukada tahun 2006. Pertarungan politik antara pasangan Irwandi Yusuf berpasangan dengan Muhammad Nazar (IRNA) yang diusung melalui jalur independen dan pasangan Human Hamid berpasangan dengan Hasbi Abdullah atau dikenal dengan istilah H2O (Human-Hasbi Oke) yang diusung oleh PPP dan disokong oleh elit GAM mengarah ke berbagai tindakan kekerasan fisik dan intimidasi. Human Hamid dipukul pendukung Irwandi ketika berhenti di kawasan Bireuen yang menjadi basis IRNA (ICC, 2007).

Pemilu 2009 menjadi episode kekerasan berikutnya dalam penegakan demokrasi di Aceh. Periode ini menjadi periode percobaan bagi Partai Aceh. Setelah usulan nama partai GAM ditolak oleh Kemenhukam RI, dan kemudian berubah menjadi Partai Aceh, dan berbagai kecurigaan lainnya masih muncul dari beberapa elit militer RI termasuk dari PDI-P (Balipost, 2006). Selain itu, Olle Törnquist (2010) dalam bukunya “Aceh :The Role of Democracy for Peace and Reconstruction” menggambarkan bahwa kekerasan dan intimidasi terhadap partai lokal meningkat seminggu menjelang hari pemungutan. Lebih lanjut, ia menulis, bahwa setidaknya 14 anggota dan pendukung PA tewas tertembak oleh orang tak dikenal.

Tensi kekerasan pada pemilu 2009 menurun, setelah SBY menjamin tidak ada lagi konflik di Aceh. Hal ini kemudian membentuk koalisi PA-Demokrat pada pemilu 2009, di mana untuk calon DPR, PA akan mendukung kandidat dari milik SBY. Hasilnya, PA memperoleh 33 kursi dari 69 kursi untuk provinsi, dan menguasai 17 kabupaten/kota, khususnya dari kawasan basis GAM. Sementara 7 dari 13 anggota DPR dari pemilihan Aceh untuk Senayan terpilih dari Partai Demokrat.

Periode berikutnya pada Pemilukada 2012. Perpecahan di elit GAM mengulang sejarah 2006 di mana Irwandi versus elit di bawah Malik Mahmud dan Zaini Abdullah. Irwandi dianggap tidak menghormati elit GAM, dan pada Pemilukada 2012 tidak dicalonkan lagi dari PA. Irwandi merespon dengan tetap maju melalui jalur independen setelah MK mencabut pasal 256 UU No. 11 Tahun 2006 terkait dengan “pembatasan” pencalonan melalui jalur independen (Chairul Fahmi & Sudarman, 2012). Konflik politik di tingkat elit ini melahirkan berbagai kekerasan di level grassroot. Sejumlah pendukung Irwandi ditembak mati, dan pembakaran terhadap berbagai fasilitas kampanye terjadi di berbagai wilayah. Beberapa etnis Jawa yang bekerja sebagai buruh juga menjadi korban (Serambi Indonesia, 2011).

Menurut Bantasyam (2012), target korban dari etnis Jawa, hanyalah sebagai “tumbal politik” agar Jakarta lebih respon terhadap dinamika pemilukada di Aceh, sebaliknya jika korbannya etnis Aceh, Jakarta tidak terlalu “bergairah” merespon cepat, karena dianggap sudah biasa. Terbukti, Pilkada kemudian ditunda sampai empat kali, setelah Kemendagri melakukan intervensi dengan menggugat tahapan pemilukada ke MK dan membuat MoU dengan PA agar mendaftarkan calon

sebagai peserta Pemilukada. Pasangan yang diusung PA akhirnya menang dengan perolehan suara telak, yaitu mencapai 56%, dan mengalahkan Irwandi yang hanya memperoleh 29%. Bahkan Irwandi kemudian menjadi korban pemukulan oleh kader PA saat menghadiri pelantikan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf di depan gedung DPRD Banda Aceh.

Irwandi kemudian mendirikan partai lokal lainnya, yaitu Partai Nasional Aceh (PNA). Beberapa mantan komandan GAM bergabung dengan PNA, seperti Sofyan Dawood (mantan juru bicara GAM/ASNLF (Aceh Sumatera National Liberation Front)), Muksalmina (juru bicara GAM Aceh Besar), Muharram (komandan GAM wilayah Aceh Besar), Abrar Muda (komandan GAM wilayah Lhok Tapaktuan), Saiful alias Cagee (komandan operasi GAM wilayah Bireuen), dan beberapa mantan GAM lainnya. Di samping itu sejumlah aktivis sipil demokrasi lainnya juga bergabung dengan partai ini, seperti Lukman Age (mantan Direktur The Aceh Institute), Asiah Uzia (mantan Koordinator KontraS Aceh), Tarmizi (Direktur Aceh People Forum), dll. PNA kemudian dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KIP (Komisi Independen Pemilihan) untuk mengikuti pemilu legislatif 2014 (KIP, 2013).

Ketua umum PA Muzakir Manaf dalam sebuah pertemuan dengan tim pemenang PA menyatakan bahwa PNA itu adalah Partai Nasrani Aceh, seperti dirilis oleh media online mengatakan: "Biar orang semua tau bagaimana Partai Aceh, bukan seperti PNA. PNA bukan Partai Nasional Aceh, tetapi Partai Nasrani Aceh," (atjehpress.com, 2014). Istilah nasrani adalah sigma yang sangat sensitif bagi warga Aceh, karena nasrani dianggap lawan dari Islam. Sehingga penyebutan ini cenderung sebagai bentuk kampanye hitam, agar warga tidak memilih PNA pada pemilu 9 April 2014.

Di sisi lain, episode kekerasan dalam pemilu 2014 menjadi potret dan konsumsi harian masyarakat Aceh. Eskalasi kekerasan terus meningkat sejak masa pendaftaran calon sampai masa kampanye terbuka. Pembunuhan, intimidasi fisik dan verbal, pembakaran, penculikan dan berbagai bentuk kekerasan lainnya menjadi bagian dari proses demokrasi 2014 di Aceh.

*Tabel 1. Daftar kekerasan pemilu di Aceh Maret 2014*

No.	Tanggal	Kasus
1	1 Maret	Pembakaran mobil caleg Parta Damai Aceh (PDA), Tgk. Razuan pukul 04. 00 dinihari oleh OTK di kecamatan Pasie Raja, Aceh Selatan
2	2 Maret	Penembakan Faisal, caleg DPRK dari PNA di kecamatan Meukek Aceh Selatan, korban tewas ditempat dan 46 peluru jenis AK-47 ditemukan ditubuh korban.
3	5 Maret	Pembakaran posko PA di kecamatan Kluet Selatan, Aceh Selatan pada pukul 03. 00 dini hari, tidak diketahui pelakunya
4	6 Maret	Pengrusakan rumah kader PA di Lhokseukon, Aceh Utara oleh sekelompok orang, diduga dari kader PNA
5		Pelemparan batur rumah Murdisyah, caleg PNA di tanah Luas

		Aceh Utara, diduga aksi balas dendam kader PA
6		Rusli, kader PNA diserang sekelompok orang menggunakan parang (senjata tajam)
7	7 Maret	Posko Gerindra di Pidie di bakar OTK
8	11 Maret	Kantor PA di Leung Bata, Banda Aceh dilempar granat
9	15 Maret	Muslim, caleg dari partai NasDem diculik dan dianiaya, tidak diketahui pelakunya
10		Kantor PNA kab. Abdya diberondong OTK, tidak ada korban jiwa
11		Posko PA di kota Langsa di bakar OTK
12	22 Maret	Rumah kader PNA Lhokseumawe di rusak OTK
13	23 Maret	Rumah timses partai NasDem milik Ismail dibakar OTK
14	25 Maret	Anggota PPS Glumpang Baro Pidie di aniaya satgas PNA Pidie dengan alasan tidak mau menurunkan atribut PA di acara Maulid
15	26 Maret	Ilyas Syafiie, kader PNA dianiaya oleh kader PA di kec. Banda Sakti, Lhokseumawe
16	28 Maret	Caleg DPRA dari PAN dikeroyok oleh sejumlah pemuda di Idi Rayeuk, Aceh Timur
17		Rumah milik Safruddin, kader PNA dibakar oleh di Seunebok, Aceh Barat

Sumber: *Serambi Indonesia*, 2014

Pada awal masa pendaftaran, korban kekerasan juga menimpa sejumlah caleg perempuan dari PNA. Lies Marcus (2014) menemukan pola kekerasan terhadap caleg perempuan tidak hanya dari stigma sosial-budaya terhadap kepemimpinan politik perempuan, juga kekerasan fisik serta mental dari pihak tak dikenal. Kekerasan fisik, seperti ancaman bunuh yang dialami oleh Zuhra, karena mendaftar sebagai caleg DPRK di Aceh Besar, atau pembakaran mobil milik Harlina, caleg perempuan dari PNA di Aceh Utara. Berbagai tekanan terhadap caleg perempuan dari PNA agar PNA tidak dapat memenuhi quota 30% caleg dari perempuan sebagaimana ketentuan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Berbagai kekerasan terhadap calon legislatif dan pendukung tidak hanya terjadi terhadap partai lokal, melainkan juga calon dari partai Nasional, yaitu partai Nasdem. Posko Nasdem di Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara diberondong dengan senjata laras panjang, serta dua kader dianiaya. Teror dengan senjata api ini dilakukan oleh Umar Adam alias Mimbe, mantan panglima sago KPA Sago Cut Meutia. Sementara senjata api merupakan senjata milik Praka Herri, anggota TNI AD yang juga teman dari pelaku (*aceh.tribunnews.com*, 2014).

Menurut Kamaruzzaman-Bustamam dalam artikelnya “Aceh dalam Lakon Wayang dan Sandiwara” (10/3/2014) menyatakan bahwa pola kekerasan dan berbagai kekisruhan yang terjadi selama pelaksanaan tahapan pemilu merupakan perilaku politik yang menganut falsafah BBM (bakar, binasa dan mampus). – istilah yang juga pernah diucapkan oleh Muzakir Manaf ketika merespon tewasnya Juwaini,

ketua DPC PNA Kuta Makmur, Aceh Utara yang diindikasikan dianiaya oleh kader PA, “Kalau dia mampus bukan urusan kita. Itu kehendak Tuhan, Ia yang telah mencabut nyawanya,” ([theglobejournal.com](http://theglobejournal.com), 7-2-2014).

Penulis melihat, pola kekerasan yang terjadi pada pemilu 2014, merupakan pola lama pada pemilukada 2012 lalu, meskipun terlihat sebagai bentuk kepanikan partai lokal *incumbent*. Terbentuknya PNA sebagai pecahan dari PA, serta partai baru seperti Nasdem dapat mengganggu perolehan suara, apalagi target PA pada pemilu 2014 minimal 80% dari total suara untuk parlemen Aceh (Republika, 10-4-2014).

Proses pencapaian target juga dilakukan dengan berbagai skenario, di antaranya dalam menentukan komisioner KIP. Berdasarkan pasal 56 UU No. 11 Tahun 2006 dan Qanun No. 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh menyatakan bahwa DPRA berwenang mengusulkan komisioner KIP Provinsi, begitu juga dengan DPRK berwenang untuk mengusulkan KIP Kabupaten/kota.

Artinya, peluang menempatkan orang-orang yang berpihak ke partai incumbent di KIP sangat mungkin, dan tidak jarang-pun terbangun politik transaksional. Seperti diakui oleh Yusrizal (2014) “pertanyaan ketika fit and proper test cenderung pertanyaan emosional, buka rasional. Seperti, jika saya pilih anda, apakah saya dapat dimenangkan pada pemilu legislatif 9 April 2014?”.

Skenario lainnya, dan terlihat panik yaitu penekanan terhadap Bawaslu Aceh dan panwaslu kabupaten/kota. Komisi A dari 17 kabupaten/kota yang dikuasai oleh PA mendesak Gubernur provinsi Aceh menarik seluruh asset pemerintah yang dipinjam-pakai untuk operasional Bawaslu, serta menarik seluruh PNS yang diperbantukan di lembaga tersebut. Beberapa Bupati/Walikota dari PA juga menolak keberadaan panwaslu dengan tidak menyatakan pembentukan panwaslu kabupaten/kota oleh Bawaslu illegal, sehingga keberadaan panwaslu di daerah tidak mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Kondisi ini seperti diakui Asqalani (2014) sangat berpengaruh kepada kerja-kerja pengawasan proses tahapan pemilu.

Terakhir, kekerasan verbal berupa intimidasi yang dilakukan pada masa kampanye terbuka. Bupati Aceh Utara yang menjadi juru kampanye PA mengatakan yang tidak memilih PA tidak akan mendapatkan jatah raskin (beras untuk orang-orang miskin). Sementara Fachrul Razi menyatakan yang tidak memilih Aceh, silakan keluar dari Aceh ([theglobejournal](http://theglobejournal.com), 2014). Berbagai episode kekerasan dalam pemilu 2014 di Aceh tidak semua terungkap sampai tuntas, beberapa tidak terungkap sampai sekarang. Sebagian lain pelakunya sudah ditangkap dan dilimpahkan ke pengadilan. Namun, kekerasan yang menimbulkan sejumlah korban jiwa dan luka, kehilangan aset dan kerugian material tidak mempengaruhi hasil yang sudah ditetapkan oleh KIP. Sebaliknya, berbagai kekerasan politik hanya menjadi pidana umum biasa.

## PENUTUP

Kekerasan juga menjadi dinamika lainnya dalam pelaksanaan pemilu 2014 di Aceh. Kekerasan seperti pembunuhan, pembakaran, penganiayaan, intimidasi verbal, dan

berbagai bentuk lainnya menjadi bagian dari proses tahapan pemilu. Ada banyak faktor terjadinya kekerasan, antara lain saingan politik, seperti lahirnya partai PNA yang dianggap dapat mengancam eksistensi suara PA, sebaliknya kader PA juga menjadi korban karena relasi PA dengan PNA merupakan relasi sesama eks-combatan, dalam bahasa Sidney Joney (2012), GAM versus GAM. Karena kekerasan yang terjadi diantara kader PA dengan PNA merupakan kelanjutan dari konflik pada pemilukada 2012 lalu, antara kubu Irwandi Yusuf dengan Zaini Abdullu dan Muzakir Manaf (dikenal sebutan Zikir).

Kekerasan yang terjadi secara sistematis dan struktural ini setidaknya untuk memberikan “teror” agar warga tidak memilih korban, karena jika tidak, mereka juga akan menjadi korban. Di sisi lain, teror terhadap beberapa caleg perempuan dari PNA pada masa pendaftaran awal, bertujuan untuk menekan agar tidak mendaftarkan diri pada partai tersebut, supaya tidak memenuhi quota 30% caleg dari perempuan, dan kemudian didiskualifikasi. Sayangnya berbagai kekerasan dan teror politik yang terjadi di Aceh tidak diungkap secara tuntas, hanya terhenti di pelaku sebagai aktor lapangan. Aktor intelektual tetap menjadi misteri, seperti halnya pada pemilukada lalu.

Terakhir, proses demokrasi di Aceh, paska reformasi dan perdamaian masih sebatas demokrasi administratif. Pemenang hanya dilihat dari perolehan jumlah suara terbanyak. Namun tidak penting, bagaimana suara itu diperoleh. Berbagai kekerasan, politik uang dan kecurangan menjadi bagian dalam dinamika demokrasi sejak dalam beberapa decade ini. Demokrasi menjadi sangat mahal, dan hanya menjadi instrumen melahirkan pemimpin-pemimpin hedonis dan kleptokratis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, Edward. *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*, California: Stanford University Press. 2005
- Crisis Group, International. *Indonesia: Averting Election Violence in Aceh*, Jakarta: Update Briefing, 2012
- Drexler, Elizabeth F. *Aceh, Indonesia: Securing the Insecure State*, USA: University of Pennsylvania, 2008.
- Fahmi, Chairul & Sudarman. *Kekerasan dalam Demokrasi*. Banda Aceh: The Aceh Institute. 2012
- HAM, Koalisi NGO, *Peta Konflik dan Kekerasan 2013*, Paper Analisi, 2013.
- Institute for Policy Analysis of Conflict. *Aceh’s Surprising Election Results*, IPAC Report No. 10. 30 April 2014.
- IFAC, *Aceh’s Surprising Election Results*, Institute for Policy Analysis of Conflict, April 2014.
- International Foundation for Electoral System, *Elections in Indonesia: 2014 National Legislative Election*, April 2014

- Lehoucq, Fabrice. *Electoral Fraud: Causes, Types and Consequences*, Mexico: CIDE, 2002.
- Macdonald, Geoffrey. *Election Rules and Identity Politics: Understanding the Success of Multi-Ethnic Parties in Indonesia.*, IFES, 2013.
- Törnquist, Olle., Adi Prasetyo, Stanley & Birks, Teresa. *Aceh, The Role of Democracy for Peace and Reconstruction*, 2010.
- Palmer, Blair. *Services Rendered: Peace, Patronage and Post-Conflict Election in Aceh*, in Aspinall, Edward & Mietzner, Marcus (Ed). *Problem of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions, and Society*, Australia: Australian National University, 2010.
- Saptamaji, Rolip, *Politik Kekerasan Komunal di Indonesia*, Indprogress, Media Pemikiran Progresif, 2012